

BAB IV

KEPATUHAN JEPANG DAN KOREA SELATAN TERHADAP AGREEMENT ON COMFORT WOMEN 2015

Bab IV secara umum akan membahas tentang pokok rumusan permasalahan skripsi ini, yaitu bagaimana efektifitas *Agreement on Comfort Women* pada tahun 2015 terhadap upaya perbaikan hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Pada bab ini akan secara merinci menjelaskan terkait seberapa besar perjanjian ini dapat mengakomodir kepentingan diantara kedua negara yang kemudian akan mempengaruhi kepatuhan, dan efektifitas perjanjian tersebut dalam usahanya memperbaiki hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Pada bab ini, penulis akan mengaplikasikan kerangka teoritik yang digunakan untuk menganalisa skripsi ini. Yaitu, Konsep Perjanjian Internasional, Kepatuhan (Compliance) dan Kepentingan Nasional.

A. Realisasi Kepentingan Jepang dan Korea Selatan dalam *Agreement on Comfort Women*

Sebagai sebuah perjanjian yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. *Agreement on Comfort Women* didasari atas berbagai kepentingan yang dibawa oleh kedua negara, baik Jepang dan Korea Selatan.

1. Realisasi Kepentingan Korea Selatan

Kepentingan Korea Selatan tentu didasarkan atas aspirasi banyak masyarakat terkait keadilan bagi para *jugun ianfu*. aspirasi masyarakat dan aktivis ini bergulir lamanya dari tahun 1992 hingga 2015. Selama hampir dua puluh tiga tahun masyarakat turun ke jalan dan berdemonstrasi menuntut keadilan akan para *jugun ianfu*. Ada beberapa hal yang menjadi poin terpenting dalam tuntutan masyarakat dan para aktivis. Pertama adalah permintaan maaf dan pemberian kompensasi yang setimpal

kepada para *jugun ianfu*. Sebenarnya pemberian kompensasi sudah pernah terlaksana di tahun 1993, dimana pada saat itu, Jepang melalui *Asian Women Fund*, mendistribusikan kompensasi dan permintaan maaf yang saat itu masih berupa surat permintaan maaf untuk para *jugun ianfu*. Namun bentuk permintaan maaf seperti ini kemudian menuai banyak kecaman dari para *jugun ianfu* karena dianggap tidak mencerminkan ketulusan Jepang dalam meminta maaf dan penyesalannya.

Selain tuntutan permintaan maaf dan kompensasi, tuntutan lain yang dituntut masyarakat adalah mengenai pengakuan formal terhadap sejarah dan keberadaan *jugun ianfu*. Pengakuan ini menjadi penting bagi para *jugun ianfu* agar sejarah ini diketahui oleh masyarakat Jepang dan tidak lagi dilakukan dimasa depan. Bentuk pengakuan yang bisa dilakukan adalah dengan memasukan *jugun ianfu* sebagai bagian dari perundang undangan atau kurikulum sejarah. Sehingga *jugun ianfu* tidak dipandang sebagai mitos belaka dan diakui keberadaannya. Selain itu, hukuman setimpal bagi para pelaku juga menjadi tuntutan. Perlu diketahui bahwa permasalahan *jugun ianfu* pernah dibahas dalam pengadilan militer untuk timur jauh pada tahun 1955. Pada pengadilan tersebut, permasalahan kemanusiaan seperti *jugun ianfu* memang dibahas oleh pengadilan tersebut. Namun tidak ada pelaku yang dihukum dalam pengadilan tersebut. Bahkan pengadilan khusus perempuan yang dibentuk tahun 1999 hingga 2001 pun tidak mampu memaksa Jepang untuk bertanggung jawab terkait permasalahan ini.

Namun, sepertinya kepentingan Korea Selatan dalam Agreement on Comfort Women ini tidak mendapat tempat yang layak. Dalam poin terkait kompensasi dan permintaan maaf dalam perjanjian ini misalnya, memperlihatkan seakan Jepang kembali tidak tulus dalam melakukan permintaan maaf dan memberikan kompensasi. Jepang memang memberi kompensasi dan permintaan maaf sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para *jugun*

ianfu. Namun bentuk permintaan maaf ini sama saja seperti apa yang dilakukana Jepang pada tahun 1993. Selain itu, bentuk kompensasi juga dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para *Jugun Ianfu*. Jepang tidak menyalurkannya secara langsung. Namun, memberikan bentuk kompensasi tersebut kepada Korea Selatan dan membiarkan Korea Selatan yang menyalurkannya. Sekali lagi, Jepang berusaha berpegang teguh pada perjanjian pembentukan hubungan diantara keduanya ditahun 1965, dimana pada perjanjian tersebut telah jelas menyatakan bahwa permasalahan menyangkut sejarah dimasa lalu di selesaikan dalam perjanjian ini. Selain itu, juga tidak ada langkah kongkrit untuk mengakui *jugun ianfu* dalam bentuk pengakuan formal.

Selain itu, poin lain yang cukup merugikan bagi Korea Selatan adalah mengenai sifat “Final and Irreversibly”. Dimana di akhir perjanjian ini Korea Selatan dan Jepang sepakat bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang final dan tidak dapat dipulihkan lagi dengan catatan bahwa Jepang telah menuntaskan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian ini. Sifat “*final and irreversibly*” kemudin dimaknai sebagai usaha untuk menutup permasalahan ini. Namun, dengan isi perjanjian yang timpang dengan lebih menguntungkan Jepang, sifat ini kemudian menjadi permasalahan yang cukup serius terutama bagi Korea Selatan, karena secara tidak langsung jika Korea Selatan menyetujui perjanjian tersebut dengan sifat yang “*final and irreversibly*”, maka perjanjian tersebut akan sulit di amandemen jika perjanjian ini tidak memuaskan masyarakat.

2. Realisasi Kepentingan Jepang

Jepang dalam perjanjian ini lebih berorientasi pada kepentingan politik keamanan dan ekonomi. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini Asia Timur sedang tidak stabil karena agresifnya Korea Utara dengan misil dan rudal balistiknya. Jepang membutuh aliansi untuk kemudian bertahan dalam kondisi ini. Sehingga perbaikan hubungan

dengan Korea Selatan menjadi penting bagi Jepang. Selain karena keduanya merupakan sekutu, Korea Selatan dianggap mampu menekan Korea Utara terkait uji rudal balistiknya. Bagi Jepang, kemampuan rudal balistik dan nuklir Korea Utara menjadi ancaman serius bagi Jepang, mengingat Jepang pernah menjadi korban dari bom nuklir Amerikk Serikat dmasa perang dunia II. Selain itu, Jepang membutuhkan kerjasama keamanan dengan Korea Selatan terkait pertukaran informasi rahasia untuk menunjang kebutuhan pertahanan dan keamanan. Kerjasama pertahanan dan keamanan diantara keduanya sempat tertunda akibat sentimen negatif masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang terkait sengketa teritorial dan pemasalahan historis diantara keduanya, termasuk permasalahan jugun ianfu.

Selain kepentingan politik dan keamanan, Jepang juga mengejar kepentingan kepentingan lainnya seperti kepentingan kepentingan ekonomi terkait kerjasama dan lain sebagainya. Sampai saat ini kerjasama ekonomi antara keduanya terlihat lancar dan belum menemui kendala apapun. Namun, permasalahan Jugun ianfu ini bisa saja menjadi hambatan dikemudian hari dalam hubungan kerjasama ekonomi keduanya, sehingga Jepang harus mulai berfikir untuk menyelesaikan permasalahan historis ini agar tidak menjadi hambatan dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan kedepannya.

Berbeda dengan Korea Selatan, Jepang jauh lebih diuntungkan dalam perjanjian ini. Hal ini dapat dilihat dari poin perjanjian lainnya yaitu terkait dengan patung *jugun ianfu* yang berada diluar Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Jepang meminta Korea Selatan untuk merelokasi patung tersebut dari Kedutaannya. Jepang telah lama tidak setuju dengan pembangunan patung tersebut. Patung tersebut sangat melukai martabat jepang dan dianggap sebagai penolakan Korea Selatan untuk berdamai. Jepang kemudian menggunakan perjanjian ini untuk menekan Korea Selatan untuk merelokasi patung *jugun ianfu*

tersebut sebagai syarat kelancaran perjanjian. Patung jugun ianfu adalah simbol bagi perjuangan aktivis dan masyarakat dalam memperjuangkan hak hak *jugun ianfu*. Selama Jepang tidak bertanggung jawab dengan sungguh sungguh dalam masalah, maka tidak ada alasan bagi pemerintah maupun masyarakat untuk merelokasi patung tersebut dari tempatnya sekarang. Dan perlu digarisbawahi bahwa patung tersebut dibangun oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak mempunyai wewenang untuk merelokasinya tanpa persetujuan masyarakat.

Sifat “Final and Irrevesibly” juga sangat menguntungkan Jepang. hal ini dikarenakan jika kedua negara berhasil mencapai kesepakatan ini maka kecil peluang kasus ini akan terungkit di masa depan di antara Jepang dan Korea Selatan. hal ini dikarenakan sifat ini yaitu jika kedua negara sepakat maka perjanjian ini akan menjadi puncak penyelesaian permasalahan dan tidak ada perjanjian lain yang dapat menggantikan perjanjian ini.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi kepentingan Jepang dan Korea Selatan dalam perjanjian ini terlihat timpang. Isi perjanjian lebih menguntungkan Jepang dari pada Korea Selatan. Hal ini dapat terlihat dari konsistennya Jepang untuk tidak secara langsung menyampaikan permintaan maaf dan memberi kompensasi. Jepang masih berpegang teguh pada perjanjian pembentukan hubungan bilateral yang tidak mengharuskan Jepang untuk memberi kompensasi secara langsung. Selain itu tidak ada pengakuan yang kuat terkait jugun ianfu yang disampaikan oleh Jepang. Jepang memang meminta maaf, namun belum secara kuat mengakui keterlibatannya dalam pengorganisasian *Jugun Ianfu*. Selain itu, perjanjian ini juga cukup politis, karena lebih mementingkan perbaikan hubungan dibanding berorientasi pada jugun ianfu sebagai objek perjanjian tersebut. Melihat fakta yang ada dan ketimpangan dalam perjanjian ini. Maka dapat diprediksi bahwa Korea Selatan memiliki peluang untuk tidak patuh terhadap perjanjian ini. Hal ini didasarkan pada faktor faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam *On*

Compliance yang di tulis oleh Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes. Faktor faktor tersebut adalah ambiguitas, kapabilitas dan dimensi temporal. *Agreement on Comfort Women* ini memiliki kapabilitas yang rendah bagi Korea Selatan dikarenakan tidak banyak memuat kepentingannya. Memang kepentingan utama dari Korea Selatan adalah permintaan maaf dan kompensasi, namun secara pelaksanaan tidak sesuai keinginan dari Korea Selatan dan para *Jugun Ianfu*. selain itu, perjanjian ini tidak memuat langkah yang lebih kongkret dalam memulihkan martabat dan harga diri *Jugun Ianfu*, padahal hal ini adalah hal yang penting pula bagi para *Jugun Ianfu* selain permintaan maaf dan kompensasi.

B. Fakta Hubungan Jepang dan Korea Selatan Pasca Agreement on Comfort Women

Agreement on Comfort Women memang sudah ditandatangani oleh Jepang dan Korea Selatan. namun sepertinya, perjanjian ini tidak menjamin penerapannya akan berjalan mulus dan kemudian dapat memperbaiki hubungan keduanya.

I. Penolakan Masyarakat Korea Selatan terhadap Agreement on Comfort Women

Jepang dan Korea Selatan mengalami gejolak di dalam negerinya, karena menandatangani *Agreement on Comfort Women*. Di Jepang, sikap Shinzo Abe untuk menandatangani *Agreement on Comfort Women* menuai banyak kecaman dari para kelompok sayap kanan dan nasionalis.¹⁰⁵ Menurut mereka, apa yang dilakukan oleh Shinzo Abe adalah perbuatan memalukan dan mencoreng martabat Jepang.¹⁰⁶ Bahkan mereka menuntut Abe untuk melakukan harakiri karena telah mempermalukan Jepang di mata dunia melalui perjanjian ini. Kelompok sayap kanan dan nasionalis Jepang memang terkenal sangat

¹⁰⁵ Rupert Wingfield-Hayes, "Japan revisionists deny WW2 sex slave atrocities", diakses <http://www.bbc.com/news/world-asia-33754932>, pada 23 April 2018

¹⁰⁶ Ibid

sensitif dengan sejarah masa lalu. Mereka berpandangan bahwa Jepang tidak perlu melakukan permintaan maaf dalam isu-isu dimasa lalu,¹⁰⁷ termasuk isu perbudakan seksual ini. Salah satu contoh yang pernah dilakukan oleh kelompok sayap kanan ini dalam menolak isu Jugun Ianfu ini adalah ketika seorang fotografer asal Korea Selatan melakukan pameran terkait Jugun Ianfu di gedung perusahaan kamera kenamaan di Jepang, Nikon. Saat itu banyak kelompok sayap kanan yang menolak pameran tersebut dan berunjuk rasa di depan gedung pameran.¹⁰⁸

Korea Selatan tidak kalah mendapat banyak hujatan dari masyarakat dan aktivis pejuang hak *Jugun Ianfu*. Setelah *Agreement on Comfort Women* diterima oleh Korea Selatan, timbul gelombang kekecewaan dari masyarakat dan aktivis untuk pemerintah Korea Selatan yang saat itu dipimpin oleh Park Geun Hye.¹⁰⁹ Kekecewaan tersebut bukannya tanpa dasar. Sikap pemerintah Korea Selatan yang menerima perjanjian yang dianggap tidak sama sekali merepresntasikan keinginan para Jugun Ianfu membuat masyarakat marah. Bahkan terungkap fakta bahwa para penyintas Jugun Ianfu tidak sama sekali dilibatkan dalam perumusan *Agreement on Comfort*

¹⁰⁷ Dewi Agustin, “Mengintip Aktivitas Oyoku Dantai, Kelompok Sayap Kanan Nasionalis Jepang”, diakses dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/05/26/mengintip-aktivitas-uyoku-dantai-kelompok-sayap-kanan-nasionalis-jepang> pada 23 April 2018

¹⁰⁸ Lee Yoo Eun, “Pameran Foto Jugun Ianfu Korea Disabotase di Jepang” diakses dari <https://id.globalvoices.org/2012/07/21/pameran-foto-jugun-ianfu-korea-disabotase-di-jepang/> pada 23 April 2018

¹⁰⁹ Kompas, “Protes Kebijakan Pemerintah, Bisku Korea Selatan Bakar Diri”, diakses dari <http://internasional.kompas.com/read/2017/01/08/11435021/protes.kebijakan.pemerintah.bisku.korea.selatan.bakar.diri> pada 23 April 2018

Women.¹¹⁰ Selain itu, isi *Agreement on Comfort Women* tidak sama sekali menyiratkan permintaan maaf yang tulus dari Jepang, dan perlu di garis bawah bahwa tidak ada sama sekali statement yang secara jelas mengungkapkan bahwa Jepang mengakui keterlibatannya dalam pengorganisasian sistem perbudakan seksual di masa lalu. Padahal hal tersebut menjadi inti tuntutan para penyintas Jugun Ianfu.

Permintaan Jepang untuk merelokasi patung Jugun Ianfu yang terdapat didepan Kedutaan Besar Jepang di Seoul juga menuai kecaman. Para aktivis dan masyarakat menilai dengan permintaan tersebut, Jepang berusaha untuk mengelak terkait perbudakan seksual yang dilakukannya di masa pendudukan.¹¹¹ Patung Jugun Ianfu merupakan simbol kesengsaraan para Jugun Ianfu, dan sudah sepentasnya itu dapat dipahami oleh Jepang.¹¹²

Sejak pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa telah terjadi kesepakatan dengan Jepang terkait permasalahan Jugun Ianfu, banyak masyarakat yang menyuarakan aspirasinya untuk membatalkan perjanjian tersebut. bahkan, beberapa masyarakat menggunakan cara ekstrim untuk mengungkapkan aspirasinya. Salah satunya, adalah Tak Sungkang, seorang biksu berumur 64 Tahun yang rela membakar dirinya sendiri sebagai wujud protes terhadap keputusan pemerintah menerima permintaan maaf Jepang.¹¹³ ia bahkan menyebut Park Geun Hye sebagai seorang penghianat karena menyetujui perjanjian tersebut.¹¹⁴

2. Inkonsistensi Jepang dalam mengakui *Jugun Ianfu* dan Desakan Relokasi Patung *Jugun Ianfu*

Jepang sepertinya juga tidak begitu sungguh sungguh dalam meminta maaf atas sistem perbudakan

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Ibid

¹¹² Ibid

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Ibid

seks di masa lalu. Hal ini dapat dilihat Pada 1 februari 2016, dua bulan pasca penandatanganan *Agreement on Comfort Women*, Jepang mengejutkan banyak pihak dengan membantah bahwa Jepang melakukan tindakan koersif dalam isu *Jugun Ianfu*.¹¹⁵ Pernyataan ini disampaikan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Menurut Jepang tidak ada bukti yang dapat mengkonfirmasi bahwa Jepang telah melakukan tindakan pemaksaan dalam isu *jugun ianfu*. pernyataan ini terang saja menjadi membingungkan banyak pihak mengingat bahwa 2 bulan sebelumnya, Jepang baru saja menandatangani *Agreement on Comfort Women*. Dengan penandatanganan perjanjian tersebut, secara tidak langsung Jepang mengakui segala bentuk tindakan terkakit sistem perbudakan seks, termasuk terkait perekrutan secara paksa para *jugun ianfu*. Selain itu, pernyataan ini juga menjadi rancu karena sebelumnya pada tahun 1999-2001, ketika pengadilan kejahatan perang atas wanita mengadili perkara *jugun ianfu* ini. Sudah ada beberapa bukti yang jelas baik itu berupa memo maupun dokumen dokumen lain yang menyatakan bahwa pemerintah Jepang secara sah terlibat dalam pengorganisasian sistem perbudakan seksual dan perekrutan secara koersif para *jugun ianfu*.¹¹⁶

Perlahan lahan permasalahan *Jugun Ianfu* mulai kembali meluap ke permukaan. Meskipun permasalahan ini sebenarnya sudah diselesaikan melalui *Agreement on Comfort Women*. Namun sepertinya ada ganjalan dalam penerapan perjanjian ini. Jepang terus mendesak Korea Selatan untuk memindahkan patung *Jugun Ianfu* yang ada di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Jepang bersikukuh bahwa Korea Selatan harus mentaati

¹¹⁵ Inilah.com, Jepang Tetap Tak Mengakui Eksistensi Jugun Ianfu, diambil dari <https://dunia.inilah.com/read/detail/2271013/jepang-tetap-tak-mengakui-eksistensi-jugun-ianfu> pada 23 April 2018.

¹¹⁶ Komisi Hak Asasi Manusia, Loc.Cit

perjanjian yang sudah di tandatangani oleh kedua negara. Namun, permintaan Jepang tersebut tak kunjung dilaksanakan oleh Korea Selatan.¹¹⁷ Pemerintah Korea Selatan beralasan bahwa pembangunan patung *jugun ianfu* di depan Kedutaan Besar Jepang untuk Korea Selatan itu diluar kuasa pemerintah Korea Selatan.¹¹⁸ selain itu, muncul patung *jugun ianfu* lain di depan konsulat Jendral Jepang di Busan. Pembangunan patung tersebut sebagai bentuk protes atas *Agreement on Comfort Women* yang dinilai oleh banyak aktivis sebagai kesepakatan yang cacat. Hal ini kemudian berbuntut pada penarikan Duta Besar Jepang, Yasumasa Nagami dan Konsulat Jendral di Busan sebagai bentuk protes. Selain itu, Jepang juga menunda pembicaraan terkait kerjasama ekonomi antara kedua negara, termasuk kesepakatan *currency swap* dengan Korea Selatan.¹¹⁹ penundaan ini menurut Taro Aso selaku menteri keuangan Jepang didasarkan adanya ke tidak saling percayaan dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan, sehingga jika dilanjutkan maka kesepakatan ini menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Korea Selatan menyayangkan sikap Jepang menunda pembicaraan ekonomi tingkat tinggi dan kesepakatan *currency swap* dikarenakan alasan alasan politik.¹²⁰

¹¹⁷ Muh Shamil, Patung Jugun Ianfu Picu Ketegangan, diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1168960/40/patung-jugun-ianfu-picu-ketegangan-1483800407>, pada 23 April 2018

¹¹⁸ Wikanto Arungbudoyo, Protes Patung Jugun Ianfu, Diplomat Jepang Tinggalkan Korsel, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/01/09/18/1586486/protes-patung-jugun-ianfu-diplomat-jepang-tinggalkan-korsel>, pada 23 April 2018

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Novi Christiastuti, Jepang Tarik Dubes dari Korsel Terkait Patung Wanita Penghibur, diakses dari <https://news.detik.com/internasional/3389546/jepang-tarik-dubes-dari-korsel-terkait-patung-wanita-penghibur>, pada 23 April 2018

Penarikan Duta Besar Jepang ini tidak berlangsung lama. April 2017, Jepang mengirim kembali Duta Besarnya ke Korea Selatan. hal ini sebagai dampak dari ditahannya Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye karena kasus korupsi yang melibatkannya dan teman dekatnya.¹²¹ Jepang perlu mengirim kembali Duta Besarnya untuk menganalisis situasi dan mempertahankan hubungan dengan Korea Selatan ditengah ancaman nuklir Korea Utara.

3. Wacana Peninjauan Kembali *Agreement on Comfort Women* oleh Korea Selatan

Mei 2017, merupakan bulan penuh sejarah bagi Korea Selatan, Korea Selatan memiliki Presiden baru beraliran liberal bernama Moon Jae In. Kemenangan Moon Jae In dalam Pemilihan Presiden Korea Selatan membawa angin segar bagi banyak pihak, terutama para *jugun ianfu*. Benar saja, Moon Jae In sudah mendeklarasikan penolakannya Korea Selatan terhadap *Agreement on Comfort Women*. Penolakan ini didasarkan pada banyaknya aspirasi masyarakat yang menolak perjanjian ini. Deklarasi ini sekaligus menegaskan garis kebijakannya dalam isu perbudakan seksual dengan Jepang. Moon Jae In mendorong adanya konsultasi bilateral untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini kemudian mendapat dukungan dari Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres.¹²²

¹²¹ Rinaldy Sofwan, Jepang Kembalikan Dubes ke Korsel setelah Kisruh Jugun Ianfu, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170403164631-113-204624/jepang-kembalikan-dubes-ke-korsel-setelah-kisruh-jugun-ianfu>, pada 23 April 2018.

¹²² Rahman Asmardika, Warga Korsel Tolak Kesepakatan Jepang Soal Jugun Ianfu, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/05/30/18/1702955/warga-korsel-tolak-kesepakatan-jepang-soal-jugun-ianfu>, pada 23 April 2018.

Korea Selatan juga berencana untuk mendaftarkan dokumen terkait perbudakan seksual ke “*Memory of the World*” milik Badan PBB, UNESCO. Dokumen yang ingin didaftarkan Korea Selatan berisi kesaksian para *Jugun Ianfu* dimasa pendudukan Jepang. Isu budak seksual bukan lagi hanya sekedar isu antar negara, tetapi juga sebuah isu global. Melihat usaha Korea Selatan tersebut, Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, menyatakan kekecewaannya. Ia menyayangkan sikap Korea Selatan tersebut. menurutnya, pendaftaran dokumen tersebut bertentangan dengan misi dan tujuan awal UNESCO dibentuk, yaitu untuk mendorong persahabatan dan pemahaman bersama antar negara negara anggota.¹²³

Korea Selatan juga mewacanakan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap *Agreement on Comfort Women*. Peninjauan ini dikarenakan perjanjian ini dianggap perjanjian yang cacat dan tidak berorientasi korban sesuai standar penyelesaian masalah masalah hak asasi manusia.¹²⁴ Namun wacana tersebut gagal terealisasi karena terdapat bukti secara sah bahwa kedua negara telah setuju bahwa permasalahan terkait perbudakan seks telah diselesaikan dan tidak dapat dipulihkan kembali pada tahun 2015 lalu.¹²⁵ Namun, Moon Jae In tetap meminta kepada Jepang untuk melakukam tindakan tindakan lain yang

¹²³ Wikanto Arungbudoyo, Jepang Protes Upaya Pendaftaran Dokumen Budak Seks ke PBB, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/07/12/18/1734148/jepang-protos-upaya-pendaftaran-dokumen-budak-seks-ke-pbb>, pada 23 April 2018

¹²⁴ Arie Mega Prastiwi, Jepang dan Korsel Bersitegang Soal Budak Seks Perang Dunia II, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3208774/jepang-dan-korsel-bersitegang-soal-budak-seks-perang-dunia-ii>, pada 23 April 2018

¹²⁵ Harian Nasional, Korsel tak Ingin Renegosiasi soal Jugun Ianfu, diakses dari www.harnas.co/2018/01/09/korsel-tak-minta-renegosiasi-soal-ianfu, pada 23 April 2018.

dapat memulihkan harkat dan martabat *Jugun Ianfu* Korea Selatan. Namun usulan tersebut ditolak oleh Jepang. Jepang menolak untuk melakukan perluasan untuk perjanjian tersebut.

Permasalahan renegotiasi dalam perjanjian internasional sebenarnya diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian bilateral. Permasalahan renegotiasi atau bahkan pembatalan dan penghentian dapat dilihat dalam bagian 4 terkait amandemen dan modifikasi perjanjian internasional, Dinyatakan bahwa sebuah perjanjian memiliki kemungkinan untuk di ubah atas kesepakatan diantara negara peserta perjanjian. Namun renegotiasi sendiri tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Jika *Agreement on Comfort Women* ini memiliki ukuran yang jelas mengenai ketentuan perubahannya, maka baik Jepang dan Korea Selatan wajib mengikuti ketentuan tersebut. hal ini adalah konsekuensi karena masing masing telah mengikatkan diri dengan isi perjanjian tersebut beserta ketentuan ketentuan yang telah diatur didalamnya. Namun, jika perjanjian tersebut tidak memuat ketentuan apapun mengenai perubahan dan lain sebagainya, maka perubahan perjanjian akan mengikuti aturan dan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969.

Mengenai tingkat kepatuhan antara kedua negara, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes dalam *On Compliance*, bahwa kepentingan nasional menjadi hal terpenting dalam menentukan kepatuhan. Hubungan internasional pasca *Wesphalia Agreement* mengalami perkembangan. Hubungan negara tidak lagi dalam batasan kegerejaan namun juga mengenai kepentingan nasional masing masing negara. maka sudah pasti setiap negara pasti akan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Termasuk dalam sebuah perjanjian. Patuh atau tidaknya suatu negara akan bergantung dengan apakah perjanjian internasional tersebut dapat mengakomodir kepentingannya. Dalam kasus Jepang dan Korea Selatan terkait *Agreement on Comfort Women*, dapat dilihat bahwa sejak awal perjanjian ini tidak maksimal dalam mengakomodir

kepentingan Korea Selatan. tercatat dalam perjanjian tersebut hanya mengakomodir terkait permintaan maaf dan kompensasi bagi para *jugun ianfu*. Bahkan terkait permintaan maaf dan kompensasi tidak sesuai dengan apa yang di inginkan *jugun ianfu*. selain itu perjanjian ini juga lebih memuat kepentingan politis dibanding kepentingan untuk korban sehingga penerapannya pun menjadi tidak maksimal dan menuai banyak tentangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini tidak begitu maksimal dalam memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan.